

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 - 2016

KURNIA RIFQI FEBRIAN

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya , Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: rifkyfebrian11@gmail.com

DYAH MUTIARIN

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya , Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: mutiarin@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu sumber dana untuk mendukung keuangan daerah adalah hasil perusahaan milik daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY dan Berapa besar kontribusi Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kulon progo tahun 2014-2016. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber dan dokumentasi yaitu mengambil data dari Laporan tahunan Bank BPD DIY yang kemudian diolah menjadi data-data yang dapat dianalisis. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Bank BPD DIY telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya seluruh indikator GCG yang berdampak pada peningkatan nilai skor GCG setiap tahunnya dan juga persentase Kontribusi Bank BPD DIY terhadap PAD kabupaten Kulon Progo yang juga mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kontribusi, BUMD, PAD

ABSTRACT

One source of funding to support regional finance is the result of regional-owned companies. As it is known that the Regional Owned Enterprises (BUMD) have a role in realizing the prosperity of the region by contributing to the revenues of local revenue (PAD) either in the form of dividends or taxes. This study aims to know and analyze how the implementation of Good Corporate Governance at the Regional Development Bank of DIY Province and How much contribution of the Regional Development Bank of DIY Province to Local Own Revenue (PAD) Kulon progo district 2014-2016. In this study researchers used descriptive qualitative method with data collection in the form of interviews to resource persons and documentation that is taking data

from the annual report of Bank BPD DIY which then processed into data that can be analyzed. The result of this research is the application of Good Corporate Governance Principles at Bank BPD DIY has been running well, it can be seen from all GCG indicator that has impact on increasing the score of GCG every year and also the percentage of contribution of Bank BPD DIY to Regency PAD Kulon Progo is also increasing.

Keywords: Good Corporate Governance, Contributions, Regional Owned Enterprises, Local Original Income

PENDAHULUAN

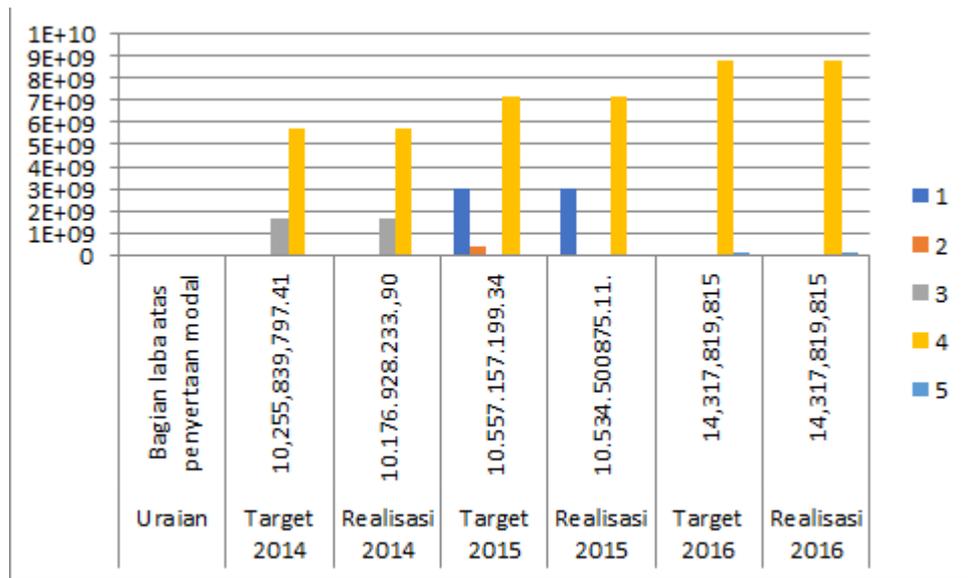
Kontribusi BUMD terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk bagian salah satu sub bidang pengelolaan kekayaan suatu negara yang dipisahkan. Masuknya kekayaan negara yang dipisahkan itu pada perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara di atas, maka didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa suatu Pemerintah wajib menyelenggarakan suatu pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan kontribusi BUMD. Secara makro, peranan Perusahaan Daerah atau BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja (Purwadi, 2002). Jika suatu pemerintah daerah mampu mengelola secara profesional dan bijaksana maka tidak tertutup kemungkinan BUMD merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial. Keberadaan suatu badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun BUMD sekarang telah dihadapkan pada dua tuntutan yang sangat perlu mendapatkan perhatian, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berorientasi sosial dan yang kedua memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua stakeholder. Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PT. Bank BPD DIY sangat menyadari bahwa pentingnya GCG lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan suatu GCG

sebagai suatu budaya. Budaya GCG yang semakin kuat hingga mengakar akan sangat mampu menjaga dan dapat meningkatkan suatu daya saing PT. Bank BPD DIY dalam suatu bisnis dan dalam pencapaian visinya.

Gambar 1
Diagram Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah BUMD Pada Tahun 2014-2016



Keterangan:

1. PT BPR Bank Pasar
2. PT Aneka Usaha
3. PT Selo Adikarto
4. BPD DIY
5. BUKP

Bank BPD DIY selalu mampu menjadi BUMD dengan Target dan Realisasi dengan jumlah tertinggi dalam memberikan Kontribusi terbesar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya.

STUDI LITERATUR

Bobby Fandhi Putra dkk (2014) dalam penelitiannya tentang analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli

daerah (Studi pada dinas pengelola keuangan daerah kota Blitar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah kota Blitar selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata persentase sebesar 97,77%. Pada tahun terakhir (2012) penerimaan retribusi daerah dari jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha mengalami penurunan persentase efektifitas, sedangkan pada retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan persentase efektifitas. Berdasarkan hasil analisis, persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 dapat dikatakan sudah efektif.

Edie Sugiarto (2015) yang berjudul Analisis Efektivitas PDAM terhadap peningkatan PAD kabupaten Lamongan. Menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan efektivitas laba penyertaan modal BUMD di kabupaten Lamongan tahun 2010 sampai tahun 2014 semakin menurun tingkat efektivitasnya, meskipun demikian masih dalam kriteria sangat efektif, dengan tercapainya hasil tersebut maka penyertaan modal BUMD adalah satu sumber pendapatan yang potensial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tetapi PDAM masih belum efektif karena laba yang didapat lebih kecil dari target yang harus dicapai.

Putu Era Fitriani Dkk (2015) yang berjudul Analisis Rasio Efektivitas dan Kontribusi Laba Perusahaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kinerja perusahaan daerah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari PDAM Kabupaten Buleleng, BPD Bali, PD. Bank Buleleng 45, PD. Swatantra dan PD. Pasar memiliki kinerja yang baik sehingga memperoleh hasil yang dicapai lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi laba perusahaan daerah terhadap PAD selama periode tahun 2009-2013 secara umum mengalami fluktuasi yang rentangnya antara 7,26-9,36. Rata-rata tingkat kontribusi laba perusahaan daerah terhadap PAD yaitu sebesar 7,91% berada dalam kategori kecil.

Bayu Pratama Putra (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015. Hasil penelitian menyimpulkan pada tahun 2010 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 3,21%. Selanjutnya pada tahun 2011 kontribusi mengalami penurunan dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 2,32 %. Pada tahun 2012 kontribusi kembali mengalami peningkatan dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012 sebesar 2,75%. Pada tahun 2013 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 2.74 %. Pada tahun 2014 terjadi penurunan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 1,78%. Selanjutnya, pada tahun 2015 kontribusi kembali meningkat dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 sebesar 3,39%.

Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance merupakan isu yang terus dikaji pada pelaku bisnis, akademis dan pembuat kebijakan, Pemahaman tentang Corporate Governance terus berevolusi dari waktu ke waktu dan pada akhir tahun 1980-an mulai banyak yang menyebutkan bahwa suatu struktur kepemilikan dalam bentuk dispersed ownership akan memberikan suatu dampak bagi buruknya sebuah kinerja manajemen (Indra Surya & Ivan Yustiavandana, 2008:24).

Corporate Governance merupakan adanya struktur, perangkat untuk mencapai suatu tujuan, dan suatu pengawasan atas kinerja. Corporate Governance yang baik dapat memberikan suatu perangsang atau suatu insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan suatu perusahaan atau pemegang saham dan harus dapat memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga dapat mendorong suatu perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Mikha Pasorong : 2012).

Menurut Adrian Sutedi (2012:2) Good Corporate Governance dapat didefinisikan: “Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang dapat mengatur dan dapat mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan suatu nilai tambah untuk semua stakeholders.”

Daniri dalam Ramadhani (2008:39) manfaat penerapan corporate governance adalah (1) Dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan efektif. (2) Dapat mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. (3) Mampu mengurangi biaya modal (cost of capital) yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik. (4) Mampu meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata public dalam jangka panjang. (5) Dapat menciptakan dukungan para stakeholders (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Tri Gunarsih dalam Sugiarto (2006) menjelaskan : bahwa perlunya corporate governance mampu mengendalikan suatu perilaku pengelola perusahaan agar perusahaan dalam bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, atau dengan kata lain untuk menyamakan suatu kepentingan antara suatu pemilik perusahaan dan suatu pengelola perusahaan. Kepentingan utama suatu pemilik dana adalah memperoleh return yang memadai atas dana yang ditanamkan. Pengelola selalu mengutamakan kepentingan suatu pemilik apabila aktivitas yang dilakukan dan keputusan yang diambil dapat untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan, yang berarti juga akan mampu meningkatkan kekayaan pemilik

Istilah Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG) diperkenalkan oleh Cadbury Committee pertama kali pada tahun 1992 dalam suatu laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Beberapa definisi tentang GCG yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Definisi GCG dapat dipandang dari dua teori, (1) teori pemegang saham (shareholding theory), dan (2) teori stakeholder (stakeholding theory).

(1) Teori pemegang saham (shareholding at theory)

Shareholding theory mengatakan bahwa suatu perusahaan didirikan dan dijalankan untuk suatu tujuan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari beberapa investasi yang dilakukannya. Shareholding theory ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Monks dan Minow (1995) memberikan beberapa definisi dari Shareholding theory yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan suatu

arah dan suatu kinerja korporasi. Shleifer dan Vishny (1997) menyebutkan bahwa GCG sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil (return) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

Pemilik (shareholders) merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap kinerja manajemen terkait dengan agency theory Berdasarkan kepentingan tersebut maka dibentuk dewan komisaris yang merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemilik untuk meyakinkan bahwa manajemen dapat mengelola perusahaan dengan baik adalah dengan corporate governance yang tepat. Dengan corporate governance yang tepat diharapkan manajemen melakukan tanggungjawabnya yang sesuai dengan kepentingan pemilik

(2) Teori stakeholder (stakeholding at theory).

Stakeholders juga diartikan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan. Batasan stakeholders tersebut yaitu bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholders , karena stakeholders merupakan pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas segala aktivitas serta segala kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholders bukan tidak mungkin akan menuai mendapatkan protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholders (Adam C. H, 2002 dalam Hadi, 2011).

Menurut teori stakeholders suatu manajemen organisasi diharapkan dapat melakukan kegiatan yang dianggap penting oleh stakeholders Teori ini mengatakan bahwa seluruh stakeholders mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang

bagaimana suatu kegiatan organisasi memengaruhi seluruh stakeholders bahkan seluruh stakeholders memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika seluruh stakeholders tidak bisa secara langsung melakukan peran konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004 dalam Yuniarti, 2007).

Freeman (1984), memperkenalkan teori stakeholders yang menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi stakeholder ini termasuk juga karyawan, pelanggan, kreditur, suplier, dan masyarakat sekitar dimana suatu perusahaan tersebut beroperasi. Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Good Corporate Governance merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.

Diharapkan melalui stakeholders theory pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, semakin jelaslah bahwa stakeholders theory adalah suatu pendekatan yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi dan menjelaskan secara analitis tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam menjalankan aktivitas usaha. Kemudian dilakukan pemetaan terhadap hubungan -hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis.

PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah “Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan

prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness)”.

2.2.2.1 Indikator GCG

indikator GCG menurut BI, yaitu sebagai berikut.

- (1) Transparansi (transparency) yang berarti suatu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - a. Bank mampu mengungkapkan suatu informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, terperinci, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan .
 - b. Bank mengungkapkan suatu informasi yang meliputi tetapi dengan tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan dan non keuangan Bank, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, emunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
 - c. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
 - d. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

(2) akuntabilitas (accountability) yaitu suatu kejelasan fungsi dan pelaksanaan dalam pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.

- a. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- b. Bank dapat menetapkan suatu tugas dan suatu tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang mampu menyamakan suatu visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank
- c. Bank harus mampu meyakini bahwa masing-masing anggota beberapa Dewan Komisaris dan beberapa Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mampu berkompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG
- d. Bank telah menyetujui check and balance system dalam pengelolaan Bank.
- e. Bank telah mempunyai ukuran kinerja dari semua Jajaran Bank yang berdasarkan ukuran yang telah disepakati secara konsisten dengan beberapa nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *rewards and punishment* system

(3) Pertanggungjawaban (responsibility) yang berarti suatu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam beberapa prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

- a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

- b. Bank sebagai good corporate citizen selalu memperhatikan lingkungan dan melaksanakan suatu tanggung jawab sosial secara wajar
- (4) Independensi (independency) merupakan suatu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- a. Bank telah mampu menghindari terjadinya suatu dominasi yang tidak wajar oleh beberapa stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
 - b. Bank dapat mengambil beberapa keputusan yang secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
- (5) Kewajaran (fairness) merupakan suatu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak beberapa stakeholders yang timbul berdasarkan suatu perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Bank selalu memperhatikan beberapa kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan asas kewajaran (equal treatment)
 - b. Bank mampu menyiapkan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2009). Dengan berlandaskan definisi ini maka

penulis berharap penelitian ini dapat memberikan fakta-fakta yang akurat mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan kontribusi Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo. Komponen – komponen yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformatif data yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dibuat dengan ringkasan catatan, mengkode data dan membuat gugusan – gugusan, membuat partisi, dan menulis memo. Maka dari itu, peneliti melakukan reduksi data agar mampu menggolongkan, megarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan – kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang telah diperoleh direduksi yang kemudian akan disajikan ke dalam laporan sistematis.

4. Menganalisa data

Analisis penelitian kualitatif dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan permasalahan, sebelum ke lapangan dan berlangsung hingga hasil penelitian.

5. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang mula – mulanya belum jelas akan meningkat

menjadi terperinci. Pada tahap ini pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis, dengan cara membandingkan, menghubungkan dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, maupun menjawab permasalahan, dan tujuan yang hendak dicapai.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY terhadap PAD Tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah Analisis Presentase Kontribusi. Analisis Kontribusi Laba Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY yang merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang telah dapat disumbangkan dari pendapatan Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY dan terhadap pendapatan asli daerah (Freddy De Rooy, 2015).

Analisis Presentase Kontribusi dinyatakan dalam formula :

$$\% \text{Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan hasil laba Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY

Y = Realisasi Penerimaan PAD

PEMBAHASAN

Tabel 1

Hasil Penilaian Good Corporate Governance Self Assesment Tahun 2014 - 2016

No	Faktor Penilaian	2014			2015			2016		
		Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot	Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot	Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,92	10%	0,19	1,40	10%	0,14	1,92	10%	0,19
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,92	20%	0,38	1,92	20%	0,38	1,92	20%	0,38
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1,92	10%	0,19	1,40	10%	0,14	1,92	10%	0,19
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,4	10%	0,14	1,40	10%	0,14	1,4	10%	0,14
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,92	5%	0,10	1,92	5%	0,10	1,92	5%	0,10

6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,2	5%	0,11	2,20	5%	0,11	2,2	5%	0,11
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,4	5%	0,07	1,40	5%	0,07	1,4	5%	0,07
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal	2,2	7,50%	0,17	2,20	7,5%	0,17	2,2	7,50%	0,17
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)	1,4	7,50%	0,11	1,92	7,5%	0,14	1,92	7,50%	0,14
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	1,92	5%	0,29	1,92	15%	0,29	1,4	15%	0,21
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate	1,92	5%	0,14	2,72	5%	0,14	1,92	5%	0,1

	Governance dan pelaporan internal									
		Total Skor : 1,88			Total Skor : 1,81			Total Skor : 1,80		
		Peringkat : 2			Peringkat : 2			Peringkat : 1		

Peringkat faktor Good Corporate Governance dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.

Tabel 2

Kategori Peringkat Good Corporate Governance (GCG)

1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Berdasarkan data indeks GCG yang ada, berikut adalah analisis Indeks GCG. Pada tahun 2014 dengan total skor 1,88 Good Corporate Governance berada

pada peringkat 2 ini bermakna mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan good corporate governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip good corporate governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip good corporate governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank, begitu juga dengan taun 2015. Kemudian pada tahun 2016 Good Corporate Governance dengan skor 1,80 peringkat 1 ini berarti mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan good corporate governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank.

Tabel 3

Ikhtisar Keuangan

No	Uraian	2014	2015	2016
	ASET			
1	Kas	296.58	338.93	317.08
2	Giro Pada Bank Indonesia	542.79	652.05	494.51
3	Giro pada bank lain	7.61	5.01	2.88
4	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1,301.06	1,480.93	2,304.92
5	Kredit yang diberikan	4,896.34	5,256.42	5,616.58
6	Pembiayaan Syariah	291.24	336.60	373.86
7	Efek-efek untuk Tujuan Investasi	350.98	426.48	439.79

8	Aset Tetap	102.64	157.68	156.84
9	Aset Tak berwujud	1.19	0.91	0.85
10	Aset Pajak Tangguhan	15.82	18.95	21.13
11	Aset Lain-lain	60.83	66.61	77.34
12	Total Aset	7,821.59	8,689.89	9,739.53
	LIABILITAS			
13	Liabilitas Segera	84.37	88.59	36.30
14	Simpanan dari bank lain	6,368.03	6,841.38	7,380.20
15	Simpanan dari bank lain	241.36	329.76	568.09
16	Utang Pajak	19.54	26.58	24.67
17	Pinjaman yang diterima	52.12	81.38	50.97
18	Liabilitas lain-lain	85.96	97.15	110.43
19	Total Liabilitas	6,851.38	7,464.85	8,170.66
	EKUITAS			
20	Modal ditempatkan dan disetor penuh	559.49	559.49	735.63
21	Dana Setoran Modal	0.00	176.15	264.37
22	Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	-0.22	0.98	0.07
23	Saldo Laba			
	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	255.94	301.87	357.02

	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	155.01	186.55	211.78
24	Total Ekuitas	970.22	1,225.04	1,568.87
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
25	Pendapatan bunga bersih	531.19	584.40	659.92
26	Laba Operasional	225.11	256.99	290.12
27	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	221.02	251.69	286.27
28	Laba Bersih	163.63	186.15	211.78
29	Laba Komprehensif Tahun Berjalan	162.76	187.35	210.86
	RASIO KEUANGAN			
30	ROA (%)	2.88	2.94	3.05
31	ROE (%)	22.59	21.99	17.7
32	NIM (%)	7.83	7.50	17.7
33	BOPO (%)	72.64	71.98	70.15
34	LDR (%)	80.34	80.99	80.84
35	CAR (%)	16.61	20.22	21.61
36	NPL (GROSS) (%)	0.90	1.05	3.40
37	NPL (Netto) (%)	0.37	0.51	2.47

Dari ikhtisar keuangan diatas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh indikator keuangan menunjukkan trend meningkat. Aset Bank mencapai Rp 9,739.53 miliar, dengan laba mencapai Rp 210.86 miliar. Pada akhir tahun 2016

pencapaian rasio keuangan Bank BPD DIY posisi Desember 2016, CAR sebesar 21,61%, Return on Equity (ROE) sebesar 17.7%, Net Interest Margin (NIM) sebesar 17.7%, Return on Asset (ROA) sebesar 3.05%, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 70.15 % serta Loan to Deposit Ratio (LDR) 80.84%, dan tingkat NPL gross sebesar 3.40% dan NPL Netto sebesar 2.47%.

PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

Tabel 4

JENIS PENERIMAAN	TAHUN		
	2014	2015	2016
a. Pajak Daerah	21.171.477.417,00	25.528.089.698,50	31.393.835.053,70
b. Retribusi Daerah	6.777.314.436,00	6.965.714.003,25	9.857.662.642,63
c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.176.928.233,90	10.534.500.875,11	14.317.819.815,93
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.221.986.306,27	127.794.021.981,48	124.704.046.082,43
JUMLAH	158.800.563.703,19	170.822.326.558,34	180.273.363.594,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

Realisasi Kontribusi BPD DIY terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

Tabel 5

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
BPD DIY	5.713.983.775,68	7.130.490.884,32	8.803.939.516,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo

Maka didapat hasil besaran kontribusi Bank BPD DIY terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016 dalam Persen yaitu:

1. 2014

$$\begin{aligned}\% \text{ Kontribusi} &= 5.713.983.775,68 / 158.800.563.703,19 \times 100\% \\ &= 4\%\end{aligned}$$

2. 2015

$$\begin{aligned}\% \text{ Kontribusi} &= 7.130.490.884,32 / 170.822.326.558,34 \times 100\% \\ &= 4\%\end{aligned}$$

3. 2016

$$\begin{aligned}\% \text{ Kontribusi} &= 8.803.939.516,00 / 180.273.363.594,69 \times 100\% \\ &= 5\%\end{aligned}$$

TRANSPARANSI (*TRANSPARENCY*)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan good corporate governance dan pelaporan internal Adapun implementasi penerapan prinsip ini adalah sebagaimana penulis uraikan terhadap beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan *transparency* yaitu pertanyaannya apakah perusahaan (Bank BPD DIY) sudah mengembangkan system akuntansi berdasarkan standar yang berlaku, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY Bapak David Ilyas Saputra,

Sudah, Bank BPD DIY Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan Pengawasan

Hal ini juga terlihat bahwa selama tahun 2014-2016, Bank BPD DIY sebagai lembaga perbankan selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan GCG serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI). Menurut pengamatan saya selama penelitian, dijumpai bahwa bank ini sudah melakukan pengembangan sistem akuntansi yang dapat mendukung dan memperlancar aktivitas atau operasional bank sebagai mana yang diharapkan. Laporan tahunan Bank BPD DIY pun dengan mudah dapat diakses pada website resmi karena telah diunggah sehingga bisa dilihat oleh siapa saja dengan bebas.

AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY mengatakan bahwa :

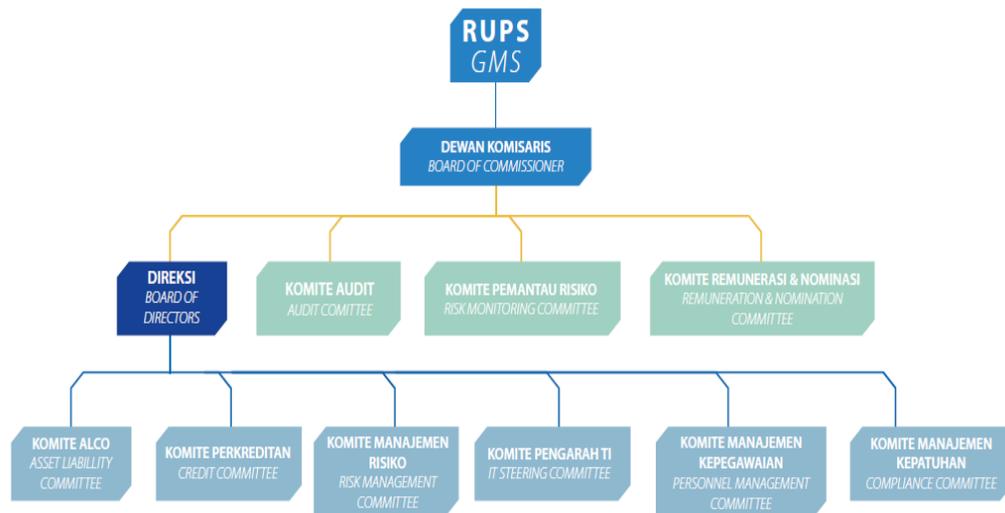
“PT. Bank BPD DIY mengungkapkan informasi secara tepat waktu, lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan selalu diterbitkannya laporan bank dengan tepat waktu setiap tahunnya dengan substansi yang sangat jelas mulai dari, Profil, analisis & pembahasan manajemen, laporan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan (GCG), tata kelola unit usaha syariah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), laporan teknologi informasi, dan laporan audit independent.”

Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governanace* pada Bank Umum dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan GCG, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan keuangan

PT. Bank BPD DIY mengungkapkan informasi secara tepat waktu, lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan selalu diterbitkannya laporan bank dengan tepat waktu setiap tahunnya dengan substansi yang sangat jelas mulai dari, Profil, analisis & pembahasan manajemen, laporan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan (GCG), tata kelola unit usaha syariah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), laporan teknologi informasi, dan laporan audit independent.

Bagan 5.2

Struktur Organisasi GCG PT. Bank BPD DIY



Sumber: Laporan Tahunan Bank BPD DIY 2016

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam operasional PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dilaksanakan sebagai kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. RUPS ini merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS pemegang saham menggunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan.

PERTANGGUNG JAWABAN (*RESPONSIBILITY*)

Berkaitan dengan prinsip ini, maka seluruh anggota Dewan Komisaris Bank (BPD) DIY telah mengikuti fit and proper test dimaksud dan semuanya telah pula dinyatakan lulus oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan cukup banyak di bidang perbankan dan di bidang keuangan, baik di dalam maupun diluar negeri. Hal ini tercantum dan dapat dilihat pada curriculum vitae masing-masing, yang menggambarkan pengalaman mereka dibidang perbankan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir dan lain sebagainya

Untuk mendukung terlaksananya penerapan GCG di Bank BPD DIY yang independen dan transparan, Bank BPD DIY telah menunjuk pula konsultan, untuk melakukan review dan *reassessment* serta memberikan bahan masukan terhadap pelaksanaan penerapan GCG selama ini, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya apakah perusahaan selalu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Tabel 5.15
Rapat Umum Pemegang Saham 2014

Tanggal Date	No.	Materi Material
17 Januari 2014 January 17, 2014	1.	Membahas tentang surat pengunduran diri Direktur Utama PT. Bank BPD DIY. <i>Discussing about the letter of resignation President Director of PT. Bank BPD DIY.</i>
	2.	Lain-lain <i>Other material.</i>
27 Januari 2014 January 27, 2014	1.	Penugasan Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan dan mengusulkan calon direksi <i>Assignment of BOC to the Nomination and Remuneration Committee to prepare and propose candidates for directors.</i>
	2.	Penugasan Direksi yang ada untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam hal Direksi baru belum terbentuk <i>Assignment of the existing Board of Directors to carry out his duties and in the case of a new Board of Directors has not been formed.</i>
14 Maret 2014 March 14, 2014	1.	Laporan Dewan Komisaris tentang hasil seleksi calon Direksi PT. Bank BPD DIY <i>BOC's report on the results of selection of candidates for the Board of Directors of PT. Bank BPD DIY.</i>
25 Maret 2014 March 25, 2014	1.	Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY, persetujuan neraca, perhitungan laba/rugi untuk tahun buku 2013 <i>The accountability report of Directors and Board of Commissioners of PT. Bank BPD DIY, approval of the balance sheet, the profit / loss for the financial year 2013.</i>
	2.	Pengesahan setoran modal, pembagian deviden dan Dana Pembangunan Daerah <i>Ratification of the capital injection, the distribution of dividends and the Regional Development Fund.</i>
	3.	Penunjukan Auditor <i>Auditor designation.</i>
	4.	Lain-lain <i>Other material.</i>
23 April 2014 April 23, 2014	1.	Penetapan keputusan pergantian Direktur Utama <i>Decision making on turn of President Director</i>
	2.	Pembatasan kebijakan strategis kepada Plt. Direktur Utama <i>Restrictions strategic policy to the temporary substitute of President Director.</i>
21 Agustus 2014 August 21, 2014	1.	Pemberhentian dengan hormat Direksi yang sedang bertugas <i>Honorable discharge the Board of Directors who was on duty.</i>
	2.	Penetapan Direksi baru secara definitif untuk periode 2014 - 2018 <i>Determination of the new Board of Directors definitively for the period 2014 - 2018</i>
16 Desember 2014 December 16, 2014	1.	Pengesahan setoran modal masing-masing pemegang saham <i>Ratification of the capital contribution of each shareholder.</i>

Sumber: Laporan Tahunan BPD DIY 2014

Tabel 5.16
Rapat Umum Pemegang Saham 2015

Tanggal Pelaksanaan <i>date</i>	Agenda RUPS <i>GMS Agenda</i>	Keputusan RUPS <i>GMS Decision</i>
16 Maret 2015 <i>March 16, 2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Laporan Keuangan <i>Approval of the Financial Statements</i> • Pengesahan Modal <i>Approval of capital</i> • Penunjukan KAP <i>The appointment of public accountant</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengesahkan Laporan Keuangan <i>Ratify Financial Statement</i> • Mengesahkan Modal <i>Approving capital</i> • Menunjuk KAP <i>Approving public accountant</i>
28 Desember 2015 <i>December 28, 2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Board of Supervisor Inauguration</i> • Mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan <i>Revising chapter 18 about Limited Liability Company basic budget</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dan mengangkat kembali dewan pengawas syariah <i>Assigning and re-inaugurate Supervisory Board of Sharia</i> • Mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan tentang penggunaan laba dan pembagian deviden <i>Revising chapter 18 of Limited Liability Company basic budget regarding the management of profit and dividends distribution</i>

Sumber: Laporan Tahunan BPD DIY 2015

Tabel 5.17

Rapat Umum Pemegang Saham 2016

Tanggal Pelaksanaan <i>date</i>	Agenda RUPS <i>GMS Agenda</i>	Keputusan RUPS <i>GMS Decision</i>
08 April 2016 <i>April 08, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Laporan Keuangan <i>Approval of the Financial Statements</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengesahkan Laporan Keuangan <i>Ratify Financial Statement</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Modal <i>Approval of capital</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengesahkan Modal <i>Approving capital</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan KAP <i>The appointment of public Accountant</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk KAP <i>Approving public accountant</i>

Sumber: Laporan Tahunan BPD DIY 2016

INDEPENDENSI (*INDEPENDENCY*)

Bank (BPD) DIY telah menjalankan prinsip Independensi ini dengan cara menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Penerapan prinsip *independency* pada Bank (BPD) DIY terlihat bahwa, tidak ada dominasi dari pihak lain baik itu LSM atau serikat buruh dan juga konsultan, selain itu adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang melibatkan semua pemegang saham. Untuk LSM atau serikat buruh tidak ada pengaruh yang dapat mengganggu kelangsungan perusahaan, misalnya mengenai mogok kerja buruh yang terjadi di beberapa kota – kota Indonesia yang meminta kenaikan upah minimum, hal tersebut tidak terjadi pada perusahaan. Untuk jasa konsultan dimana konsultan pajak hanya bertugas untuk melakukan penghitungan pajak perusahaan dan hanya sebatas memberikan saran atau masukan, konsultan pajak tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pemegang saham terbesar tetapi berdasarkan diskusi dengan pemegang saham yang lain dalam rapat baik mayoritas maupun minoritas, dan beliau juga mengatakan perusahaan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya selain RUPS tahunan ada juga RUPS yang diadakan apabila ada hal mendesak misalnya apabila perseroan ingin mengganti susunan komisaris dan sebagainya. Pada rapat setiap pemegang saham baik itu pemegang saham mayoritas maupun minoritas tidak dibedakan dalam mengikuti rapat, selain itu setiap pemegang saham juga berhak memberikan pendapatnya. Rapat ini bertujuan agar keputusan yang diambil tersebut bersifat objektif dan tidak berdasarkan keputusan satu pihak saja.

KEWAJARAN (*FAIRNESS*)

PT. Bank (BPD) DIY telah menerapkan prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- (1) Memperhatikan kepentingan stakeholder dengan penyajian yang wajar tentang bagi hasil, pendapatan bank.
- (2) Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank (BPD) DIY telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

(3) Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, dilakukan dengan melaksanakan mekanisme atau tata cara penanganan yang telah disusun oleh Bank (BPD) DIY.

(4) Prinsip kewajaran diterapkan dengan baik oleh Bank (BPD) DIY dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang diaudit setiap tahun dan dinyatakan wajar dan Bank (BPD) DIY menyampaikan setiap masalah yang ada segera dicarikan jalan keluarnya.

Salah satu bentuk penerapan prinsip kewajaran ini adalah dengan ditampilkannya ikhtisar keuangan yang memuat seluruh data Asset, Liabilitas, Utang, Ekuitas, Laba, Pendapatan dan Beban Operasional, rasio keuangan dan lain-lain dalam Laporan Tahunan Bank BPD DIY.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Bank BPD DIY terkait dengan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan prinsip Transparansi pada Bank (Bank BPD DIY) telah dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan bank Bank BPD DIY Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan Pengawasan. Hal ini juga terlihat bahwa selama tahun 2014-2016, Bank BPD DIY sebagai lembaga perbankan selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan GCG serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI).
2. Penerapan prinsip Akuntabilitas pada Bank (Bank BPD DIY) telah dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan PT. Bank BPD DIY mengungkapkan informasi secara tepat waktu, lengkap, jelas, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan selalu diterbitkannya laporan bank dengan tepat waktu setiap tahunnya dengan substansi yang sangat jelas mulai dari, Profil, analisis & pembahasan manajemen, laporan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan (GCG), tata kelola unit usaha syariah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), laporan teknologi informasi, dan laporan audit independent.”

3. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban pada Bank (Bank BPD DIY) telah dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan adanya dukungan terlaksananya penerapan GCG di Bank BPD DIY yang independen dan transparan, Bank BPD DIY telah menunjuk pula konsultan, untuk melakukan review dan reassessment serta memberikan bahan masukan terhadap pelaksanaan penerapan GCG selama ini, selain itu prinsip pertanggung jawaban ini juga dilakukan dengan program-program Corporate Social Responsibility yang mencakup 4 Sektor yaitu Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Sektor Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi, dan Sektor UKM Center. Semua program CSR pada keempat sektor tersebut telah dilakukan setiap tahun sejak tahun 2008 dan disebutkan secara eksplisit pada Laporan tahunan Bank setiap tahunnya.
4. Penerapan Prinsip Independensi pada Bank (BPD) DIY telah dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun terhadap penyaluran kreditnya
5. Penerapan Prinsip Kewajaran pada Bank (Bank BPD DIY) telah dilakukan dengan sangat baik. Ditandai dengan adanya Bank (BPD) DIY telah menerapkan prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran diterapkan dengan baik oleh Bank (BPD) DIY dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang diaudit setiap tahun dan dinyatakan wajar dan Bank (BPD) DIY menyampaikan setiap masalah yang ada segera dicarikan jalan keluarnya.

6. Bahwa ketika Hasil Penilaian Good Corporate Governance semakin baik maka meningkat pula Kontribusi Bank BPD DIY Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat dilihat dari dampak meningkatnya peringkat GCG dari tahun 2014 dengan skor 1,88 (Peringkat 2), 2015 dengan skor 1,81 (Peringkat 2), dan 2016 dengan skor 1,80 (Peringkat 1) berbanding lurus dengan persentase kontribusi Bank BPD DIY yakni sebesar 4% di tahun 2014, 4% pada tahun 2015, dan 5% pada tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston.
- Minow, N. dan Bingham, K. (1995), The ideal board, dalam Monks, R. dan. Minow, N. (Eds), *Corporate Governance*, Blackwell, Cambridge, MA.
- Nugroho, D. R. (2012). *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang baik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Syakrani. (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Aplikasi – Teori*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Ferdian, Y. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi UNP*, 1-27.
- Freddy De Rooy, N. B. (2015). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4*, 451-461.
- Haryuli, O. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, dana bagi hasil, derajat Desentralisasi, dan derajat kontribusi BUMD Terhadap alokasi belanja modal (pada provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau* , 1-15.
- Karyana, A. (2005). Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar. Vol. 1, No. 1 . *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.
- Made, S., Fakhriyyah, S., & Darawelalangi, A. (2017). Analisis Kontribusi Ekspor Ikan Kerapu (*Ephinephelus Spp.*) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan. *ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine Vol. 04 No. 02*, 126-134.
- Nurliana, M. (2016). Peran Manajemen PD “Pasar Surya” Dalam Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya (Studi Kasus Pada PD Pasar Surya Pasar Rungkut Baru). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 2 No. 2*, 541 - 556.
- Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 1-9.
- Putra, B. P. (2015). Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. *Jurnal UMRAH*, 1-21.
- Putu Era Fitriani, W. C. (2015). Analisis Rasio Efektivitas dan Kontribusi Laba Perusahaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 1-11.
- Rinaldi, U. (2015). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS* , 105-113.

Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, Vol 52. No 2. June 737-783

Sugiarto, E. (2015). Analisis Efektivitas Pdam Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Lamongan (Effectiveness Analysis Pdam To Increase Local Revenues In Lamongan). *Jurnal EKBIS*, 668-676.

Sulistiyoningsih. (2014). Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 8*, 1-16.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”, dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”, dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 247/KPTS/1995
tanggal 5 September 1995 Tentang Ruang Lingkup Rapat Umum Pemegang Saham BPD
DIY